



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PASURUAN**

2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 merupakan suatu laporan Kinerja yang telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari penulisan LKJIP untuk memberikan gambaran tingkat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja tahunan ini berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Mengingat pentingnya peranan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagai alat perbandingan dengan hasil realisasi tahun sebelumnya, serta sebagai acuan untuk membuat Rencana Kerja di tahun berikutnya. Selain itu, LKjIP juga membantu dalam pengevaluasian kinerja dan anggaran yang terealisasikan pada tahun tersebut. Sehingga dapat terlihat apabila terdapat perbedaan antara realisasi dengan Rencana Strategi (Renstra).

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan proses penyusunan dan substansi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dapat memenuhi ketentuan

tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan dalam mewujudkan stabilitas politik yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi informasi yang berguna bagi semua pihak.

Pasuruan,

2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LKJIP tahun 2023 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun Indikator Kinerja Utama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari tiga yaitu 1) Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif dengan realisasi 4,28% 2) Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan dengan realisasi 19,44% 3) Persentase pemilih dalam Pemilu dengan realisasi 0 karena di tahun 2023 tidak ada Pemilu. Dapat disimpulkan dari capaian yang diperoleh bahwa tiap indikator sudah memenuhi dari target yang ditetapkan. Adapun perbaikan dari kinerja tahun 2023 yaitu untuk tetap mempertahankan kinerja yang sudah dicapai di tahun 2023.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	4
1.2.3 Isu Strategis	4
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.....	8
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022.....	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja	26
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	26
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	26
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	30
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	32
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional	34

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	34
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	37
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	39
3.2 Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja	9
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.....	11
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.....	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022.....	15
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022	16
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022	21
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	26
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022	27
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	30
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	33
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi.....	34
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	35
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan Sasaran	38
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	39
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

LKJIP tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*) merupakan salah satu tuntutan publik pada saat ini, dimana menuntut aparaturnya untuk melaksanakannya dalam usaha mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah melalui aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Kinerja yang telah dicapai oleh suatu instansi Pemerintah khususnya Kepala Instansi tersebut dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Hal itu merupakan tujuan dari disusunnya LKJIP yaitu untuk memberikan gambaran tingkat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pembinaan kesatuan bangsa dan menjembatani terwujudnya stabilitas politik di wilayah Kota Pasuruan juga ikut andil dalam pembangunan daerah tersebut. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama, yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan, dimana berisi tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Informasi yang disajikan adalah tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan, sehingga LKjIP tersebut dapat dijadikan dasar dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pada tahun yang akan datang.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

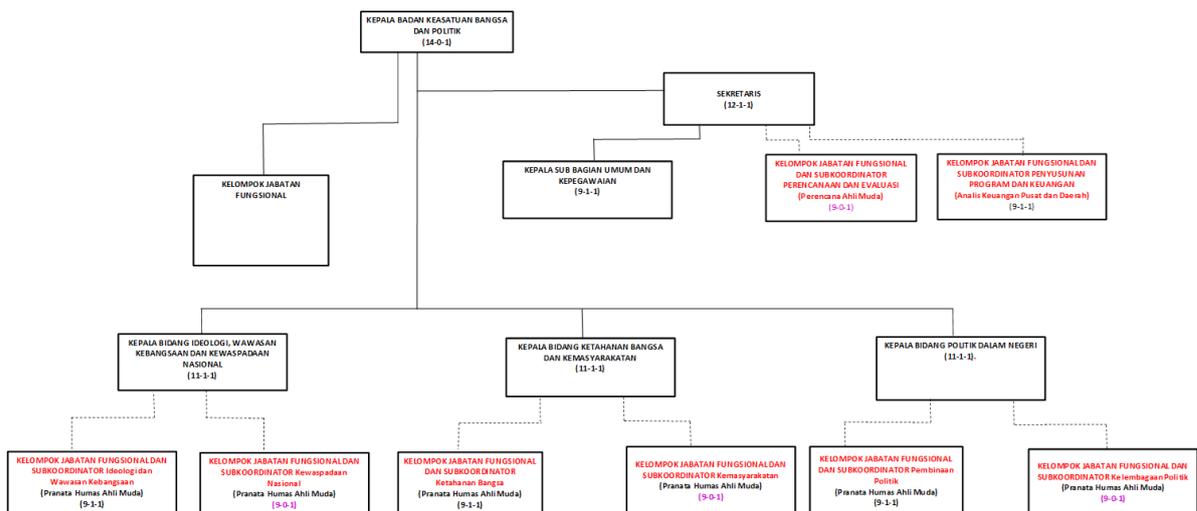
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, organisasi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik (pasal 3). Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut (pasal 4) :

- penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
- pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan kesatuan Bangsa dan Politik



Sumber : Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022

1.2.2 Anggaran

Berikut merupakan tabel perbandingan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 dan tahun2023.

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2022	Rp 9.174.080.391
APBD	Tahun 2023	Rp 11.443.226.942

Sumber : *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan*

1.2.3 Isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik-Kementerian Dalam Negeri
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tinjauan hal-hal di atas, isu-isu strategis yang dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dan akan dibenahi melalui Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis.
- c. Belum optimalnya peran kewaspadaan dini masyarakat sampai dengan jenjang paling bawah.

- d. Belum optimalnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban.
- e. Belum semua organisasi kemasyarakatan ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan.
- f. Berkembangnya isu penistaan agama (SARA).
- g. Maraknya kasus narkoba terutama yang melibatkan generasi muda.
- h. Maraknya *cyber crime* sebagai dampak globalisasi teknologi informasi.
- i. Angka kriminalitas dan unjuk rasa/demonstrasi yang masih cenderung meningkat.
- j. Ancaman radikalisme dan terorisme.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III: Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : Penutup

Berisi kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya untuk umpan balik bagi perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

a. Visi

Visi Walikota Pasuruan 2021 - 2026 sebagai Kepala Daerah terpilih merupakan visi Kota Pasuruan. Pembangunan Kota Pasuruan 2021 – 2026 diarahkan untuk mewujudkan kondisi akhir yaitu “Kota Pasuruan Kota Madinah”. Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmonis Warganya.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Walikota Pasuruan, misi yang akan dilaksanakan sebagai Misi Walikota Pasuruan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
2. Membangun Kota yang Indah dan Nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan.
3. Memantapkan kehidupan Masyarakat Multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata.
4. Transformasi Layanan Publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sebagai lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam ranah misi ke-3 yaitu, Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata.

c. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, tujuan yang dirumuskan untuk mencapai visi, melaksanakan visi, memecahkan masalah, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Meningkatnya stabilitas wilayah.

Dengan mengacu pada tujuan di atas, sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan yaitu Meningkatnya Kondusifitas Wilayah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila.			Indeks Stabilitas	74,5	76,05	77,75	78,90	80,25
		1.1	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip SKPD	73,14	73,14	73,14	73,14	73,14
		1.2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			Menjamin Pelayanan Prima						
		1.3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran sasaran SKPD	90%	90%	90%	90%	90%
		1.4	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	3%	3%	3%	3%	3%
		1.5	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%	20%	20%	20%	20%
		1.6	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	-	-	85%	-	-

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satu an	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sum ber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan: Terwujud nya Masyara kat yang harmoni yang berwawa san kebangsa an & nilai- nilai luhur Pancasila.	Indeks Stabilitas	76,05	Persen	Indeks yang mencerminkan dan mengukur kondisi kestabilan wilayah	-	Lapor an Akhir IKS tahun 2023
Sasaran 1							
2.	Meningkat nya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip SKPD	73,14	Nilai	Penilaian atas fakta objektif Pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Badan Kesat uan Bangsa dan Politik Kota Pasur uan
3	Meningkat nya Sistem Tata Kelola yang Baik	Persentas e temuan yang ditindakla njuti	100	Persen	Persentase temuan hasil pemeriksaan APEP dan APIP tahun berjalan yg ditindaklanjuti dibandingkan dg total	$\frac{\text{Jumlah temuan hasil pemeriksaan APEP tahun berjalan yg di TL} + \text{jumlah temuan hasil pengawasan APIP thn berjalan yg di TL}}{\text{Jumlah temuan hasil pemeriksaan APEP thn berjalan} + \text{jumlah temuan hasil pengawasan APIP thn berjalan}} \times 100$	Badan Kesat uan Bangsa dan Politik

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Penjelasan		Sum ber Data
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	
	dalam Menjamin Pelayanan Prima				temuan APEP dan APIP tahun berjalan		Kota Pasuruan
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	90	Persen	Persentase rata-rata capaian program penunjang pemerintah	Rata-rata capaian program penunjang pemerintah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan
Sasaran 2							
5.	Meningkatnya Ketahanan dan kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	3	Persen	Ormas aktif adalah ormas yang telah terdaftar dan teregistrasi di Bakesbangpol Kota Pasuruan serta aktif mengikuti pembinaan di tahun berjalan	$= \frac{\sum \text{ormas aktif tahun } (n) - \sum \text{ormas aktif tahun } (n-1)}{\sum \text{ormas aktif thn } (n-1)} \times 100$	Badan Ketaahan Bangsa dan Kemasyarakatan
6	Meningkatnya Ketahanan dan kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20	Persen	Konflik merupakan bagian dari potensi konflik yang tidak termediasi/tertangani. Sedangkan potensi konflik adalah suatu peristiwa yang memberikan peluang dimana terjadinya pertikaian baik antar	$= \frac{\sum \text{potensi konflik berlatar thn } (n1) - \sum \text{potensi konflik thn } n}{\text{Jumlah potensi konflik thn } (n-1)} \times 100$	Bidang IdeologiWawasan Keba ngsaan dan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	
					individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan pemerintah. Dalam hal ini, suatu even yang melibatkan pengumpulan masa juga dikatakan sebagai potensi konflik.		Kewaspadaan Nasional
7	Meningkatnya Ketahanan dan kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0	Persen	Pemilih Pemilu adalah WNI yang memiliki hak pilih untuk mengikuti PEMILU	$= \frac{\text{Jumlah pengguna hak pilih PEMILU tahun terakhir}}{\text{Jumlah DPT PEMILU tahun terakhir}} \times 100$	Bidang Politik dalam Negeri

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Adapun tujuan dan sasaran beserta Indikator selaras dengan Renja PD tahun 2023 yang dituangkan pada tabel dibawa ini :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila.		Indeks Stabilitas	Persen	76,05
		1.1	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai	73,14
		1.2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persen	100
		1.3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persen	90
		1.4	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persen	3%
		1.5	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persen	20%
		1.6	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persen	0

Sumber : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas,

fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila.	Indeks Stabilitas	76,05
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip SKPD	73,14
3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	90%
5	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	3%
6	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%
7	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023

Program	Anggaran
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp 537.138.900
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.097.138.780
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 191.728.000
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp 794.280.100
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 3.661.498.000
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.185.640.044

Adapun anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan DPA Perangkat Daerah yang dituangkan pada tabel dibawa ini :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu</i>	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10
	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah	2
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	11
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	11
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	7
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	97
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	21
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Peningkatan Penanganan Konflik	3
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1700	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik	20
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pemilih pemula yang dibina	510

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	1
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	1
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT	2
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	40
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	155
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif	20
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	85

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1750
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Konflik yang dimediasi	75
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15365

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 29 bulan 9 tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila.	Indeks Stabilitas	76,05
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip SKPD	73,14
3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	90%
5	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	3%
6	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%
7	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023

Program

Anggaran

- | | | |
|---|----|---------------|
| 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Rp | 583.791.760 |
| 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Rp | 1.814.924.500 |
| 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Rp | 126.417.200 |
| 4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Rp | 954.803.100 |
| 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Rp | 3.894.574.360 |
| 6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 4.068.716.022 |

Dengan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu</i>	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10
	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah	2
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	11
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	11
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	7
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	220
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	18
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	21
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantro dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Peningkatan Penanganan Konflik	3
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1700	

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik	20
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Jumlah pemilih pemula yang dibina</i>	510
	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	1
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	1
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	72
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT	2
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	40
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	155
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif	20
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	85
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1750
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Konflik yang dimediasi	75
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15365

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila.	Indeks Stabilitas	76,05	89,68	117,92	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip SKPD	73,14	75,51	103,24	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan
3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	90%	96,38%	107,09%	Sangat Tinggi	Bidang Sekretariat
5	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	3%	4,28%	142,6%	Sangat Tinggi	Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan
6	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%	19,44%	97,22%	Sangat Tinggi	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional
7	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0	0	0	-	Bidang Politik dalam Negeri

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui bahwa terdapat 6 indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Kota Pasuruan yaitu :

a. Indeks Stabilitas

Tahun 2022 realisasi indeks stabilitas sebesar 86,16% sehingga capainnya 115,65% dengan target 74,5% sedangkan di tahun 2023 realisasinya 89,68% dan capainnya 117,92% dengan target 76,05%. Dapat disimpulkan bahwa indikator indeks stabilitas mencapai target bahkan melebihi target. Hal tersebut didukung oleh program-program yang ada di Bakesbangpol Kota Pasuruan telah berhasil menjaga stabilitas Kota Pasuruan. Metode perolehan data terkait indikator tersebut diperoleh dari survey yang dilakukan di empat Kecamatan yaitu Gadingrejo, Purworejo, Bugulkidul dan Panggungrejo.

b. Nilai Sakip SKPD

Nilai Sakip Bakesbangpol di tahun 2022 yang merupakan nilai akuntabilitas kinerja tahun 2021 yaitu 65,51 sedangkan di tahun 2023 yang mana hasil penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2022 yaitu 75,51. Hal tersebut menunjukkan di tahun 2022 Bakesbangpol sudah memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dari inspektorat terkait kinerja yang kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga nilai Sakip Bakesbangpol tahun 2022 meningkat.

c. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Tingkat capaian indikator persentase temuan yang ditindaklanjuti tahun 2022 adalah 100%. Berdasarkan temuan internal (inspektorat) tersebut, inspektorat memberikan 3 rekomendasi atas catatan temuan untuk perbaikan. Bakesbangpol Kota Pasuruan telah menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses tindaklanjut tersebut tuntas dan berdampak baik untuk ke depannya.

d. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD

Tahun 2023 realisasi rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD sebesar 96,38% sehingga capainnya 107,09% dengan target 90%. Dapat disimpulkan bahwa indikator persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD mencapai target bahkan melebihi target. Hal ini karena

didukung beberapa faktor yaitu 1) Mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang diharapkan 2) Adanya komitmen dan dukungan SKPD untuk berakuntabilitas

e. Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif

Tahun 2022 realisasi Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif sebesar 4,28% sehingga capainnya 142,6% dengan target 3%. Dapat disimpulkan bahwa indikator persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif mencapai target bahkan melebihi target. Metode perolehan data terkait formulasi indikator sasaran diatas diperoleh dari perhitungan jumlah ormas/LSM yang terdata di Bakesbangpol Kota Pasuruan dan mempunyai Surat Keterangan Teregister. Sehingga dari formulasi di tabel 2.2 diperoleh realisasi sebesar 4,28%.

f. Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan

Tahun 2022 realisasi indikator persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan 19,44% sehingga capaiannya 97,22% dengan target 20%. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan mencapai target. Metode perolehan data dalam formulasi perhitungan indikator sasaran diatas diperoleh dari pelaporan kejadian konflik dan even-even yang menyebabkan kerumunan massa yang mana akan direkap oleh petugas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional di Bakesbangpol Kota Pasuruan serta dari survei pemantauan ke lapangan. Sehingga berdasarkan formulasi pada tabel 2.2 diperoleh realisasi sebesar 19,44%.

g. Persentase pemilih dalam Pemilu

Untuk indikator persentase pemilih dalam pemilu tidak ada realisasi maupun target di tahun 2023 karena tidak ada Pemilu.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila.	Indeks Stabilitas	74,5	86,16	115,65	76,05	89,68	117,92	
1	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip SKPD	73,14	65,51	89,57	73,14	75,51	103,24	
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	90%	94,90%	105,44%	90%	96,38%	107,09%	
4	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	3%	8,75%	291,66%	3%	4,28%	142,6%	
5	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%	72,72%	363,63%	20%	19,44%	97,22%	
6	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase pemilih dalam pemilu	-	-	-	-	-	-	Tahun 2022 & 2023 tidak ada Pemilu sehingga target (-)

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.3 diketahui bahwa realisasi nilai Sakip tahun 2021 sebesar 65,51% dengan target 73,14% sehingga capainnya 89,57%. Sedangkan tahun 2022 realisasinya 75,51% sehingga capainnya 103,24%

dengan target yang sama. Kenaikan nilai sakiip dipengaruhi karena adanya komitmen dan dukungan SKPD untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pada indikator persentase temuan yang ditindaklanjuti, di tahun 2022 dan 2023 realisasinya sama yaitu sebesar 100% dengan target 100% sehingga capainnya 100%. Pada indikator persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD realisasi tahun 2022 sebesar 94,90% sehingga capainnya 105,44% dengan target 90%. Sedangkan tahun 2023 realisasinya 96,38% sehingga capainnya 107,09% dengan target yang sama. Kenaikan realisasi ini salah satunya dipengaruhi oleh memaksimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Pada indikator persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif tahun 2022 sebesar 8,75% dengan target 3% sehingga capainnya 291,66%. Sedangkan tahun 2023 realisasinya 4,28% sehingga capainnya 142,6% dengan target yang sama. Indikator persentase peningkatan ormas yang aktif mengalami penurunan di tahun 2023. Penurunan capaian ini dikarenakan sumber data yang dihitung di tahun 2022 berbeda dengan sumber data di tahun 2023. Dengan realisasi 4,28%, Bakesbangpol Kota Pasuruan telah mencapai target 3%. Ketercapaian target indikator ini dipengaruhi oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung IKU Kepala Bakesbangpol sehingga berhasil mencapai target. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mencapai target antara lain : 1) Pembinaan terhadap ormas/LSM terkait kepengurusan SKT 2) Aplikasi siOLA yang dapat mengakomodir pendaftaran SKT secara online. 3) Petugas pelayanan pendataan SKT yang kompeten.

Realisasi persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan tahun 2022 sebesar 72,72% dengan target 20%, sehingga capaiannya sebesar 363,63%. Sedangkan tahun 2023 realisasinya 19,44% sehingga capaiannya 97,22% dengan target yang sama. Indikator persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan mengalami penurunan di tahun 2023. Penurunan nilai realisasi tersebut dikarenakan jumlah konflik di tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2023. Sehingga Bakesbangpol Kota

Pasuruan berhasil menurunkan angka konflik di Kota Pasuruan. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu 1) Adanya koordinasi secara kontinyu dengan tim intel, TNI, POLRI, dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan setiap potensi konflik yang muncul. 2) Pemanfaatan IT yang maksimal untuk kecepatan dan ketepatan informasi.

Indikator Persentase pemilih dalam Pemilu tidak ada realisasi karena tahun 2022 tidak dilaksanakan Pemilu.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
1	Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila.	Indeks Stabilitas	89,68	80,25	111,75
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip SKPD	75,51	73,14	103,24
3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	96,38%	90%	107,09%
5	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	4,28%	3%	142,67%
6	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	19,44%	20%	97,2%
7	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0	0	0

Sumber : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Periode 2021-2026

Berdasarkan tabel 3.4 di atas diketahui bahwa indikator Nilai Sakip SKPD menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 103,24% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. Sedangkan indikator Persentase temuan yang ditindaklanjuti menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 100%. Untuk indikator Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 107,09%.

Indikator persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 142,67% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. Sedangkan indikator persentase penurunan konflik di

Kota Pasuruan menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 97,2%. Untuk indikator Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu tidak bisa dilihat tingkat kemajuan di tahun 2023, karena tidak ada pelaksanaan Pemilu.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Kota /Daerah Lain

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar Kota/Daerah lain

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Kota/daerah lain

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Kota/Daerah lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	19,44%	-	-
2	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	4,28%	-	-
3	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0	-	-

Sumber : data tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, tidak bisa membandingkan realisasi kinerja antara Bakesbangpol Kota Pasuruan dengan Daerah/Kota lain dikarenakan tidak tersedianya dokumen LKPJ dari Bakesbangpol Kota/Daerah lain yang memuat kinerja tahun 2023.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila.	Indeks Stabilitas	76,05	89,68	115,65	Dari survey yang dilakukan didapat hasil indeks stabilitas di Kota Pasuruan sangat tinggi.	
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip SKPD	73,14	75,51	103,24	Adanya komitmen Bakesbangpol untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, sehingga nilai sakip 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021	
3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Bakesbangpol Kota Pasuruan telah menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses tindak lanjut tersebut tuntas dan berdampak baik untuk ke depannya.	
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	90%	96,38%	107,09%	Melakukan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang diharapkan.	
5	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	3%	4,28%	142,6%	Adanya faktor yang mendukung keberhasilan capaian target indikator salah satunya petugas pelayanan pendataan SKT yang kompeten	
6	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%	19,44%	97,22%	1. Adanya koordinasi secara kontinyu dengan tim intel, TNI, POLRI dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan potensi konflik yang muncul 2. Pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal untuk kecepatan dan ketepatan informasi	
7	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0	0	0	Indikator Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu bernilai 0 karena di tahun 2023 tidak ada Pemilu	

Sumber : IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.6, didapat uraian sebagai berikut :

- a. Pada indikator indeks stabilitas, variabel yang membentuk pada indeks tersebut adalah variabel melestarikan lingkungan dan patuh pada peraturan negara. Nilai variabel melestarikan lingkungan sebesar 85,79 dan variabel patuh pada peraturan negara 87,75 masuk kategori sangat

tinggi. Data tersebut berdasarkan survey yang dilakukan di empat Kecamatan di Kota Pasuruan. Sehingga dapat dikatakan sebagian besar penduduk Kota Pasuruan tidak abai akan kondusifitas wilayah Kota Pasuruan.

- b. Pada indikator Nilai Sakip SKPD, dengan target 73,14 dan realisasi 75,51 menunjukkan bahwa adanya komitmen Bakesbangpol untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, sehingga nilai sakip 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021.
- c. Pada indikator Persentase temuan yang ditindaklanjuti, dengan target 100 dan realisasi 100, menunjukkan bahwa semua temuan yang ada telah ditindaklanjuti. Bakesbangpol Kota Pasuruan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses tindak lanjut tersebut tuntas dan berdampak baik untuk ke depannya.
- d. Pada indikator Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD, diperoleh realisasi 96,38 dengan target 90. Ketercapaian indikator ini karena telah dilakukan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang diharapkan, sehingga persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD dapat mencapai target.
- e. Pada indikator Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif, diperoleh realisasi 4,28% dengan target 3%. Ketercapaian indikator ini karena didukung beberapa faktor yaitu 1) Pembinaan terhadap ormas/LSM terkait kepengurusan SKT 2) Aplikasi siOLA yang dapat mengakomodir pendaftaran SKT secara online 3) Petugas pelayanan pendataan SKT yang kompeten
- f. Pada indikator Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan, diperoleh realisasi 19,44% dengan target 20%. Ketercapaian indikator ini karena didukung beberapa faktor yaitu 1) Adanya koordinasi secara kontinyu dengan tim intel, TNI, POLRI dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan potensi konflik yang muncul 2) Pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal untuk kecepatan dan ketepatan informasi

g. Pada indikator Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu, diperoleh realisasi 0% dengan target 0%. Hal ini dikarenakan tahun 2023 tidak ada Pemilu.

Berikut merupakan beberapa dokumentasi yang mendukung keberhasilan tujuan/sasaran :



Gambar 3.1 Petugas yang kompeten untuk melayani pendaftaran SKTr Ormas



Gambar 3.2 Koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan potensi konflik yang muncul

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tujuan Sasaran**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisien si
			Tar get	Realisa si	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capai an	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkat nya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip SKPD	73,14	75,51	103,24	102.780.80 0	59.956.714	58,3 3%	77,0%
2	Meningkat nya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanj uti	100%	100%	100%	4.227.640.0 44	3.684.555.7 59	87,1 5%	22,9%
3	Meningkat nya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase rata-rata ketercapai an pelaksanaa n program dukungan sasaran SKPD	90%	96,38%	107,09%	4.227.640.0 44	3.684.555.7 59	87,1 5%	14,7%
4	Meningkat nya ketahanan dan Kondusifit as Wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	3%	4,28%	142,6%	1.081.220.300	995.521.948	92,07 %	50,53 %
5	Meningkat nya ketahanan dan Kondusifit as Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%	19,44%	97,22%	4.478.366.120	3.747.602.082	83,68 %	13,54 %
6	Meningkat nya	Persentase partisipasi pemilih	0	0	0	1.814.924.500	1.801.053.194		0%

	ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	dalam Pemilu						99,23 %	
--	------------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	---------	--

Sumber : IKU dan DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023

Berdasarkan table 3.7 di atas pada indikator Nilai Sakip SKPD memiliki tingkat efisiensi paling tinggi yaitu 77,0%. Hal tersebut dikarenakan di dalam sub kegiatan evaluasi kinerja PD yang masuk dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat belanja jasa penyelenggara acara yang tahun 2023 masih diampu kegiatan Perencanaan. Belanja jasa penyelenggara acara tersebut tidak terserap 100% karena perubahan rencana saat kegiatan MTQ di Kota Pasuruan. Efisiensi yang lain diperoleh dari pembelian ATK dan bahan cetak karena harga di e-katalog lebih rendah dari yang tertera di DPA.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	142,6%	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan Ormas/LSM yang ber-SKT	209,00%	Menunjang	Di tahun 2023 indikator tersebut mencapai target terbukti dengan jumlah Ormas/LSM baru yang bertambah dan yang memperpanjang Surat Keterangan Teregister, sehingga

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								jumlah ormas aktif meningkat
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang dibina	104,33	Menunjang	Ketercapaian target di kegiatan ini dilandasi karena besarnya antusias Ormas/LSM yang aktif hadir di setiap kegiatan guna mengikuti pembinaan agar dapat menyalurkan ilmunya ke Masyarakat sekitar.
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	356,45	Menunjang	Lembaga ekonomi, sosial dan budaya termasuk didalamnya terdapat Ormas/LSM yang mendirikan Lembaga tersebut sehingga peran LSM/Ormas mempengaruhi persentase Lembaga yang aktif.
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	104,58	Menunjang	Semakin meningkatnya tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif, akan menggerakkan pula jumlah ormas/LSM yang aktif
2	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	97,22%	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi	153,50	Menunjang	Pembinaan ideologi akan membentuk pola pikir masyarakat berpedoman

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tas Wilayah				Pancasila dan karakter kebangsaan			pada ideologi Pancasila, sehingga masyarakat akan lebih bermoral dan menurunkan konflik di Kota Pasuruan
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan penanganan konflik	138,92	Menunjang	Peningkatan penanganan konflik akan mempercepat penyelesaian konflik yang ada, sehingga berdampak pada jumlah konflik yang terjadi
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang dimediasi	133,33	Menunjang	Semakin sedikit konflik yang dimediasi,, menunjukkan bahwa Kota Pasuruan semakin stabil dan kondusif
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan penanganan konflik	104,17	Menunjang	Peningkatan penanganan konflik akan mempercepat penyelesaian konflik yang ada, sehingga berdampak pada jumlah konflik yang terjadi
3	Meningkat nya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	-	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan Pendidikan politik	195,65	Menunjang	Semakin banyak masyarakat yang mendapatkan Pendidikan politik,semakin sukses pula pelaksanaan Pemilu damai
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan	Jumlah pemilih pemula yang dibina			

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		0	-	-

Sumber : Data Monev Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023

Berdasarkan table 3.8 di atas seluruh program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjang IKU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	583.791.760	517.538.500	88,65
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	583.791.760	517.538.500	88,65
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	1.814.924.500	1.801.053.194	99,24

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.814.924.500	1.801.053.194	99,24
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	126.417.200	102.777.194	81,30
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	126.417.200	102.777.194	81,30
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	954.803.100	892.744.754	93,50
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	954.803.100	892.744.754	93,50
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.894.574.360	3.230.063.582	82,94
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.894.574.360	3.230.063.582	82,94
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.068.716.022	3.684.555.759	90,56
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.780.800	59.956.714	58,33
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.032.112.544	2.732.030.948	90,10
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.612.000	44.567.800	97,71
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.085.880	37.925.888	94,61
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.177.860	221.264.437	98,26

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.745.300	180.346.500	97,62
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.351.638	230.536.449	93,96
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.850.000	177.927.023	92,26

Sumber : Data Moneyv Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Memiliki pagu anggaran Rp 583.791.760 dan realisasi Rp 517.538.500, sehingga capaiannya 88,65%.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik didukung oleh 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Memiliki pagu anggaran Rp 1.814.924.500 dan realisasi Rp 1.801.053.194, sehingga capaiannya 99,24%.
- c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan didukung oleh 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Memiliki pagu anggaran Rp 126.417.200 dan realisasi Rp 102.777.194, sehingga capaiannya 81,30%.
- d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya didukung oleh 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Memiliki pagu anggaran Rp 954.803.100 dan realisasi Rp 892.744.754, sehingga capaiannya 93,50%.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Memiliki pagu anggaran Rp 3.894.574.360 dan realisasi Rp 3.230.063.582, sehingga capaiannya 82,94%.

- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Memiliki pagu anggaran Rp 4.068.716.022 dan realisasi Rp 3.684.555.759, sehingga capaiannya 90,56%.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan disimpulkan bahwa program yang memiliki serapan anggaran tertinggi adalah Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Hal ini dapat tercapai selain karena perencanaan dan penganggaran yang tepat serta kerjasama antara Bakesbangpol dengan berbagai pihak terkait. Sedangkan program yang memiliki serapan anggaran paling rendah adalah Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu sebesar 81,30%. Pada program ini, anggaran yang tidak terserap dari sisa anggaran kegiatan yang mana harga di e-katalog lebih rendah dari harga yang tertera di DPA.

BAB IV PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Secara umum capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sesuai dengan PK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, persentase capaian setiap indikator yaitu : 1) Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif realisasinya 4,28% sehingga capainnya 142,6% dengan target 3%. 2) Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan realisasinya 19,44% sehingga capaiannya 97,22% dengan target 20%. 3) Persentase pemilih dalam Pemilu tidak ada realisasi karena tahun 2022 tidak dilaksanakan Pemilu.

Untuk mencapai target setiap indikator tentu tidak lah mudah. Dibutuhkan sinergi antara Bakesbangpol Kota Pasuruan dan masyarakat untuk mewujudkan wilayah yang aman, tertib dan kondusif. Dalam hal ini, adanya sikap tertutup masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat baru merupakan tantangan bagi Bakesbangpol Kota Pasuruan. Tentunya diperlukan edukasi dan pembinaan agar mereka mau bekerja sama dengan pemerintah guna mewujudkan wilayah aman dan tertib. Upaya yang akan dilakukan Bakesbangpol Kota Pasuruan tentunya tetap konsisten menjalankan program dan kegiatan sesuai tupoksi yang sudah tertera sesuai Renstra tahun 2021-2026 agar Kota Pasuruan menjadi Kota yang maju ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Bakesbangpol Tahun 2023

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON II
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
WALI KOTA PASURUAN

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP. 196409171990031013

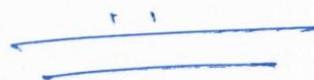
PERJANJIAN KINERJA**ESELON II**

NAMA : DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP : 196409171990031013
PANGKAT / GOL. : PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / 13
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase Rata-Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	90
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	73,14
3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100
4	Terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila	Indeks stabilitas	76,05
5	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	3
6	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0
7	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20

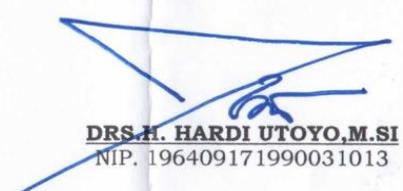
NO	PROGAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 537.138.900	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Rp 1.097.138.780	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 191.728.000	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 794.280.100	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 3.661.498.000	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.185.640.044	
JUMLAH		Rp 10.467.423.824,00	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA PASURUAN


Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 02 Januari 2023

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK


DRS. H. HARDI UTOYO, M.SI
NIP. 196409171990031013

PERJANJIAN KINERJA

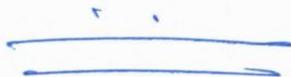
ESELON II

NAMA : DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
 NIP : 196409171990031013
 PANGKAT / GOL. : PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
 JABATAN / KELAS JABATAN : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / 13
 PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																								%		
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			JML	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase Rata-Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	Persen	3,5	1	12	51	25	47	31	05	45	63	59	49	64	53	71	19	74	43	78	39	86	85	90	90			
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	0		0		0		0		0		0		0		73	14	0		0		0		0		73,14		
3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Persen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		10	0	0		0		100		
4	Terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila	Indeks stabilitas	Nilai	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		76	05	76,05		
5	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Persen	0		0,5		0		0		0		1		0		2		0		0		3		0		3		
6	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Persen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
7	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	Persen	0		0		5		0		0		10		0		0		15		0		0		20		20		
CAPAIAN OUTPUT																														
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																														

NO	PROGAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 537.138.900	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Rp 1.097.138.780	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 191.728.000	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 794.280.100	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 3.661.498.000	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.185.640.044	
JUMLAH		Rp 10.467.423.824,00	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA PASURUAN



Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 02 Januari 2023

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK



DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP. 196409171990031013

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bakesbangpol Tahun 2023

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
Jabatan : PIt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,
WALI KOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

Pihak Pertama,
PIt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP. 196409171990031013

PERJANJIAN KINERJA**ESELON II**

NAMA : DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP : 196409171990031013
PANGKAT / GOL. : PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / 13
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila	Indeks stabilitas	76,05	76,05
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase Rata-Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	90	90
3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	73,14	73,14
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100	100
5	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	3	3
6	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0	0
7	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20	20

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 508.791.760	Rp 583.791.760	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Rp 1.081.564.580	Rp 1.814.924.500	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 191.728.000	Rp 126.417.200	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 860.901.100	Rp 954.803.100	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 3.596.798.340	Rp 3.894.574.360	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.227.640.044	Rp 4.068.716.022	
JUMLAH		Rp 10.467.423.824,00	Rp 11.443.226.942	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA PASURUAN



SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 02 Oktober 2023

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK



DRS.H. HARDI UTOYO, M.SI
NIP. 196409171990031013

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA : DRS.H. HARDI UTOYO,M.SIMENINGKATNYA KETAHANAN DAN KONDUSIFITAS WILAYAH
 NIP : 196409171990031013
 PANGKAT / GOL. : PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
 JABATAN / KELAS JABATAN : PIt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / 13
 PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																								%				
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			JML			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase Rata-Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	Persen	3,51	12,51	25,47	31,05	45,63	59,49	64,53	71,19	74,43	78,39	86,85	90	90																
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	0	0	0	0	0	0	0	73,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,14						
3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100						
4	Terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila	Indeks stabilitas	Nilai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,05	76,05						
5	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Persen	0	0,5	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3					
6	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	Persen	0	0	5	0	0	0	10	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20						
CAPAIAN OUTPUT																																
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																																

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 508.791.760	Rp 583.791.760	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Rp 1.081.564.580	Rp 1.814.924.500	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 191.728.000	Rp 126.417.200	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 860.901.100	Rp 954.803.100	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 3.596.798.340	Rp 3.894.574.360	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.227.640.044	Rp 4.068.716.022	
JUMLAH		Rp 10.467.423.824,00	Rp 11.443.226.942	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA PASURUAN



SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 02 Oktober 2023

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK



DRS.H. HARDI UTOYO,M.SI
NIP. 196409171990031013

Lampiran 3 : Matriks Renstra

Matriks Renstra Bakesbangpol

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mengembangkan aktualisasi nilai – nilai keagamaan dan kearifan local, untuk membangun harmoni social dan kesalehan social dalam kehidupan bermasyarakat		Indeks Modal Sosial	54,38					
		Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase penurunan potensi konflik di masyarakat	2,50 %					
2.	Mewujudkan Kehidupan masyarakat multicultural yang harmonis		Indeks Kesalehan Sosial		74,37	75,45	77,13	78,43	80,06
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Stabilitas		74,5	76,05	77,75	78,90	80,25